

ABSTRAK

Perusahaan sebagai suatu unit usaha yang mempekerjakan karyawan-karyawan diwajibkan untuk memotong PPh Pasal 21 terhadap karyawannya. Berdasarkan Undang-undang Perpajakan RI No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, PPh Pasal 21 merupakan pajak yang ditanggung karyawan. Tetapi, jika perusahaan mempunyai kebijakan untuk menanggung PPh Pasal 21 tersebut, maka ada tiga alternatif kebijakan lainnya yaitu kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan, PPh Pasal 21 diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan dan PPh Pasal 21 di *gross up*

Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah pebandingan antara keempat alternatif kebijakan PPh Pasal 21 yaitu kebijakan PPh Pasal 21 yang ditanggung oleh pegawai, ditanggung oleh perusahaan, ditunjang oleh perusahaan dan di *gross up* serta pengaruhnya terhadap pajak penghasilan terutang pada PT. Asuransi Jiwasraya.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif analitis yaitu suatu metode yang melukiskan, memaparkan, menuliskan dan melaporkan keadaan perusahaan berdasarkan fakta yang ada untuk kemudian diolah menjadi data yang selanjutnya dianalisis sehingga diperoleh suatu kesimpulan. Data-data dikumpulkan dengan cara penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan pada PT. Asuransi Jiwasraya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa asuransi.

Berdasarkan hasil penelitian ternyata PT. Asuransi Jiwasraya selama ini menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung oleh perusahaan. Apabila perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan dan di *gross up*, maka akan terhadap perbedaan dalam hal pajak penghasilan terutang, tingkat laba perusahaan serta selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung oleh perusahaan. Jumlah pajak penghasilan terutang untuk kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan perusahaan karena perusahaan membayar pajaknya lebih kecil, sedangkan untuk jumlah selisih antara biaya fiskal dan biaya komersial yang harus ditanggung oleh perusahaan juga lebih menguntungkan karena perusahaan menanggung selisih yang lebih kecil.

Penulis menyimpulkan bahwa penerapan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up* lebih menguntungkan daripada penerapan kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung pegawai, ditanggung perusahaan, diberikan dalam bentuk tunjangan pajak oleh perusahaan, khususnya dalam hal pajak penghasilan terutang dan jumlah gaji yang dibawa pulang oleh pegawai (*take home pay*). Penulis menyarankan supaya perusahaan menerapkan kebijakan PPh Pasal 21 di *gross up*.

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	iii
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Kegunaan Penelitian.....	4
1.5 Rerangka Pemikiran dan Hipotesis.....	5
1.6 Metodologi penelitian.....	9
1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Dasar- dasar Perpajakan.....	11
2.1.1 Definisi Pajak.....	11
2.1.2 Ciri- Ciri Pajak.....	14
2.1.3 Fungsi Pajak.....	15
2.1.4 Tinjauan Pajak Berbagai Aspek.....	16

2.1.5	Asas-asas Pemungutan Pajak.....	17
2.1.6	Teori Pendukung Pemungutan Pajak.....	20
2.1.7	Pengelompokan Pajak.....	22
2.1.8	Tata Cara Pemungutan Pajak.....	23
2.1.9	Tarif Pajak.....	26
2.1.10	Hapusnya Utang Pajak.....	27
2.2	Pajak Penghasilan.....	28
2.2.1	Definisi Pajak Penghasilan.....	28
2.2.2	Subjek Pajak.....	28
2.2.3	Pengecualian Subjek Pajak.....	30
2.2.4	Objek Pajak.....	31
2.2.5	Pengecualian Objek Pajak.....	34
2.3	Pajak Penghasilan Pasal 21.....	36
2.3.1	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 21.....	36
2.3.2	Wajib Pajak PPh Pasal 21	37
2.3.3	Objek Pajak PPh Pasal 21.....	42
2.3.4	Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21.....	45
2.3.5	Pemotong Pajak PPh Pasal 21.....	46
2.3.6	Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21.....	52
2.3.7	Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21.....	53
2.4	Penerapan Kebijakan PPh Pasal 21.....	62
2.4.1	Alternatif Penghitungan PPh Pasal 21.....	62
2.4.2	Pajak Penghasilan Terutang.....	66

BAB III OBJEK DAN METODE PENELITIAN.....	68
3.1 Objek Penelitian.....	68
3.1.1 Sejarah Singkat Perusahaan.....	68
3.1.2 Sifat Usaha.....	70
3.1.3 Visi, Misi, dan <i>Core Values</i> Perusahaan.....	70
3.1.4 Struktur Organisasi Perusahaan.....	73
3.1.5 Uraian Tugas dan Tanggung Jawab.....	74
3.2 Metode Penelitian.....	87
3.2.1 Teknik Pengumpulan Data.....	87
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	 89
4.1 Data Perusahaan PT. ASURANSI JIWASRAYA.....	89
4.2 Kebijakan PPh Pasal 21 yang Dijalankan oleh Perusahaan.....	91
4.3 Penerapan PPh Pasal 21.....	92
4.3.1 Perhitungan PPh Pasal 21.....	92
4.3.2 Penerapan Kebijakan PPh Pasal 21 dan Pengaruhnya Terhadap PPh Terutang.....	104
4.4 Pemilihan Alternatif Kebijakan PPh Pasl 21.....	113
 BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	 117
5.1 Kesimpulan.....	117
5.2 Saran.....	118

DAFTAR PUSTAKA.....120

LAMPIRAN.....121

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Tarif PPh Pasal 21 Orang Pribadi.....	52
Tabel 2.2	Tarif PPh Pasal 21 Wajib Pajak Badan dan BUT.....	53
Tabel 2.3	Rumus Penghitungan PPh Pasal 21.....	61
Tabel 2.4	Perhitungan PPh Pasal 21.....	64
Tabel 2.5	PTKP dan PPh Pasal 21 setahun.....	65
Tabel 4.1	Daftar Gaji Tahun 2005.....	90
Tabel 4.2	Perhitungan PPh Pasal 21, Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung Pegawai.....	94
Tabel 4.3	Perhitungan PPh Pasal 21, Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan.....	97
Tabel 4.4	Perhitungan PPh Pasal 21, Kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang Perusahaan.....	100
Tabel 4.5	Perhitungan PPh Pasal 21, Kebijakan PPh Pasal 21 di <i>Gross Up</i>	103
Tabel 4.6	Perhitungan PPh Terutang, Kebijakan PPh Pasal 21 Ditanggung Pegawai/Perusahaan.....	105
Tabel 4.7	Perhitungan PPh Terutang, Kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang Perusahaan.....	106
Tabel 4.8	Perhitungan PPh Terutang, Kebijakan PPh Pasal 21 di <i>Gross Up</i> ...	107
Tabel 4.9	Laporan Laba Rugi, Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung Pegawai..	109
Tabel 4.10	Laporan Laba Rugi, Kebijakan PPh Pasal 21 ditanggung Perusahaan	110
Tabel 4.11	Laporan Laba Rugi, Kebijakan PPh Pasal 21 ditunjang Perusahaan.	111
Tabel 4.12	Laporan Laba Rugi, Kebijakan PPh Pasal 21 di <i>Gross Up</i>	112
Tabel 4.13	Perhitungan Take Home Pay, Biaya Fiskal dan Biaya Komersial Setahun.....	114
Tabel 4.14	Ikhtisar Take Home Pay, Biaya Fiskal, Biaya Komersial dan selisihnya, Laba Sebelum Pajak dan Pajak Penghasilan Terutang..	115

DAFTAR LAMPIRAN

1. Struktur Organisasi.....	121
2. Surat Setoran Pajak.....	123
3. Ikhtisar Biaya yang Deductible dan Non Deductible Expenses.....	128
4. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 564/PMK.03/2004.....	135
5. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 137/PMK.03/2005.....	137